**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 telah membawa perubahan yang mendasar pada hampir semua aspek kehidupan, baik di lingkungan masyarakat maupun di dunia organisasi, khususnya dalam “pengelolaan” organisasi pemerintahan yang tujuan utamanya adalah mensejahterakan publik/masyarakat dengan kegiatan operasinya berorientasi pada pelayanan publik. Pergeseran paradigma dan sudut pandang terhadap penyelenggaraan lembaga pemerintahan tersebut telah mendorong masyarakat untuk semakin berani dan terbuka dalam menuntut terwujudnya transparansi, dan akuntabilitas menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam kerangka “*good governance*”.

Tuntutan transparansi, dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah khususnya pada pemerintah daerah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2002 : 37) peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja sebagai bagian dalam Pengukuran Kinerja, menurut Mardiasmo (2014 : 25) Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. *Value for money* merupakan salah satu pendekatan pengukuran kinerja dengan berdasarkan pada ukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pengukuran seberapa hemat pengeluaran yang dilakukan. Efisiensi berhubungan dengan pendayagunaan sumber daya input yang diminimalkan dan hasil (output) yang dimaksimalkan. Efektivitas berkaitan dengan pengukuran seberapa tepat dalam pencapaian target organisasi.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing Satuan Kerja (Dinas) yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya dan mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan padanya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kesatuan bangsa dan politik. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara sebagai instansi yang memonitor kondisi sosial politik, budaya, ekonomi, agama, dan juga situasi pertahanan keamanan yang terus mengalami dinamika, serta sebagai organisasi yang berperan memberikan pengarahan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat. Adapun rincian program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara 2016 yaitu :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
5. Program Pendidikan Politik Masyarakat
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui apakah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulut telah melaksanakan program kerjanya dengan baik berdasarkan LAKIP tersebut, sangat penting dilakukannya penilaian kinerja untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas kinerja BAKESBANGPOL sebagai instansi pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik, terutama pada pelaksanaan program yang kegiatannya langsung menyentuh masyarakat karena masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung, maka penelitian ini dilakukan dengan menitik beratkan pada Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan 2 kegiatan yaitu; Seminar, Talk Show Peningkatan Wawasan Kebangsaan, dan Fasilitasi Sosialisasi Nilai-nilai Kebangsaan di Provinsi Sulut.

Tabel 1.1 Data realisasi anggaran kinerja BAKESBANGPOL Tahun 2016 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sasaran Strategis | Kegiatan | Anggaran | Tingkat Realisasi |
| Meningkatnya pemahaman masyarakat akan 4 pilar kebangsaan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika & NKRI | Seminar, Talk show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan Provinsi Sulut | Rp. 113.655.000,- | 93 % |
| Fasilitasi Sosialisasi Nilai-Nilai Kebangsaan | RP. 29.407.000,- | 98 % |

Sumber: DPPA & LAKIP BAKESBANGPOL Tahun Anggaran 2016

Dari uraian dan data anggaran tersebut berdasarkan LAKIP, peneliti bermaksud untuk mengukur ketercapaian kinerjanya selama Tahun Anggaran 2016, dengan *Value For Money* yaitu menilai efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi dan memperhatikan nilai ekonomisnya. Menurut ayu (2015 : 79) *Value For Money* mengandung arti sebagai penghargaan terhadap nilai uang, hal ini berarti setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, tidak hanya dilihat dari tingkat realisasi anggarannya saja atau output-nya (hasil) tetapi dilihat dari segi outcomes-nya (manfaat). Maka penulis mengangkat judul “Evaluasi Kinerja Melalui Pendekatan *Value For Money* di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Provinsi Sulawesi Utara”

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah mengenai “Bagaimana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan 2 kegiatan yaitu; Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kegiatan Fasilitasi Nilai-nilai Kebangsaan dengan pendekatan *Value For Money*?”

1. **Tujuan Penelitian**

Untuk mengevaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara pada Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan dengan 2 kegiatan yang akan diukur menggunakan pendekatan *Value For Money*; Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan dengan pendekatan, dan Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Nilai-nilai Kebangsaan.

1. **Manfaat Penelitian**
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan konstribusi positif bagi BAKESBANGPOL dalam melakukan penilaian kinerja manajerial terhadap program/kegiatan yang telah di amanahkan kepadanya.
3. Diharapkan memberikan masukan dalam hal pengembangan kurikulum pada Ilmu Akuntansi Sektor Publik, Program Studi D4 Akuntansi Keuangan, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado
4. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan dan menambah pengetahuan mengenai Akuntansi Pemerintah Daerah.